



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
BARANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2015**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Merly Liyani

022114378

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Juli 2018

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
BARANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2015**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Merly Liyani

022114378



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
BARANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2015**

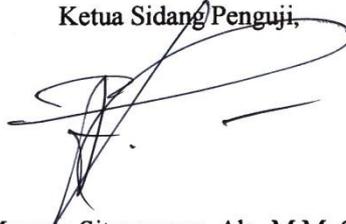
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Selasa Tanggal : 31/Juli/2018

Merly Liyani
022114378

Menyetujui

Ketua Sidang/Penguji,



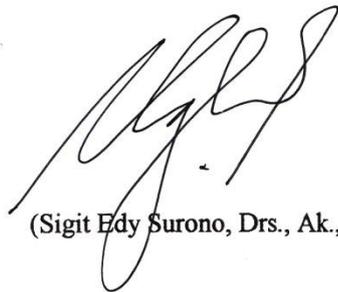
(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(H. Akhsanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Sigit Edy Surono, Drs., Ak., MM.)

ABSTRAK

Merly Liyani. 022114378. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015. Dibawah bimbingan Akhsanul Haq dan Sigit Edy Surono.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Didalam variabel independen ialah sistem pengendalian intern meneliti dua komponen yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko. Variabel independen yang penulis ambil didasari dengan peneliti terdahulu yang hasil penelitian satu dengan yang lainnya berbeda yang berarti tidak ada kekonsistenan antara hasil peneliti satu dengan yang lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive dengan menggunakan metode penelitian *Descriptive Survey*. Lokasi penelitian ini dilaksanakan disalah satu SKPD yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah. Metode penarikan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis descriptive, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak SPSS ver 23.

Dalam pembahasan variabel independen yaitu *lingkungan pengendalian* dan *penilaian resiko* menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) secara positif mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam indikator sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, masing-masing maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan sumber daya manusia perlu dilakukan pelatihan yang berkesinambungan dan peningkatan sistem komunikasi dan informasi yang baik lagi dan dalam rangka mengidentifikasi resiko dari faktor eksternal dan internal perlu membuat perencanaan yang lebih stategis dalam menghadapi tantangan-tantangan dari faktor eksternal dan peningkatan pengendalian internal.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Salam Damai Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan Berkat dan KaruniaNya, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015”**.

Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi sejak pengajuan skripsi, saat penelitian dan dalam penulisannya namun semua itu dapat penulis lalui berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari semua pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Unutuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtuaku Bapak Braven Pirie dan Ibu Herce Yulce Manaroinsong yang sangat penulis cintai, kasih, hormati dan banggakan yang selalu memberikan doa, bimbingan, nasihat dan dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini sehingga menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak H. Akhsanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE., CA., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Edy Suro, Drs., Ak., MM., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan kepada penulis.
7. Seluruh staff tata usaha dan staff karyawan yang telah banyak membantu penulis selama berada di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan bogor.
8. Sahabat-sababat terbaik yang penulis dapatkan selama menjalani kuliah (basah-basahan) Wati, Windi, Milah, Azizah, Tita, Vidia, Shella dan Nurpuspitasari (Alm) terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, canda tawa, kasih sayang dan kesabarannya, semoga kebersamaan dalam persahabatan kita selalu terjaga.

9. Teman-teman angkatan 2014 Jurusan Akuntansi S1 khususnya kelas i yang sudah seperti keluarga baru yang kadang kompak dan sering tidak kompak tapi aku akan merindukan kalian.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dorongan yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penelitian yang penulis lakukan selanjutnya. Namun demikian penulis berharap skripsi ini berguna serta bermanfaat baik bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	1
1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian	3
1.2.2. Perumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Maksud Penelitian	3
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.4.1. Kegunaan Teoritis	4
1.4.2. Kegunaan Praktik	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Sistem Pengendalian Intern	5
2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern	5
2.1.2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	5
2.1.3. Komponen Pengendalian Intern	6
2.1.4. Unsur Pengendalian Intern	9
2.1.5. Tujuan Pengendalian Intern	9
2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.2.1. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan	14
2.3. Penelitian Sebelumnya	14
2.4. Kerangka Pemikiran	17
2.5. Hipotesis Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis penelitian	20
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	20
3.2.1. Objek Penelitian	20

3.2.2.	Unit Analisis	20
3.2.3.	Lokasi Penelitian.....	20
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	21
3.3.1.	Jenis Penelitian.....	21
3.3.2.	Sumber Data Penelitian.....	21
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	21
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	22
3.6.	Metode Pengumpulan Data	22
3.6.1.	Penelitian Lapangan.....	22
3.6.2.	Penelitian Perpustakaan	23
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data	23
3.7.1.	Analisi Deskriptif.....	23
3.7.2.	Uji Kualitas Data.....	24
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik.....	24
3.7.4.	Uji Regresi Linier Berganda	26
3.7.5.	Uji Hipotesis	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN	28
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Bogor	28
4.1.2.	Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor.....	29
4.1.3.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	30
4.2.	Hasil Pengumpulan Data	37
4.2.1.	Deskripsi Data.....	37
4.2.2.	Deskripsi Data Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian	39
4.2.3.	Deskripsi Data Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko.....	40
4.2.4.	Deskripsi Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan ..	42
4.3.	Analisis Data	43
4.3.1.	Uji Kualitas Data	43
4.3.2.	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.3.3.	Uji Regresi Linier Berganda	48
4.3.4.	Uji Hipotesis	49
4.4.	Pembahasan	51
4.4.1.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan	51
4.4.2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	51
4.4.3.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	51
4.5.	Interpretasi Hasil Penelitian	51

4.5.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan	52
4.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	52
4.5.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Simpulan.....	53
5.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Operasional Variabel	21
Tabel 3. Pengelolaan Skala Pengukuran dalam Kuisisioner Responden	23
Tabel 4. Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisisioner Responden	37
Tabel 5. Deskripsi Jenis Kelamin Responden	38
Tabel 6. Deskripsi Jabatan Responden	38
Tabel 7. Deskripsi Item Pernyataan Responden Data Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1).....	39
Tabel 8. Deskripsi Item Pernyataan Responden Data Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko (X2).....	40
Tabel 9. Deskripsi Item Pernyataan Responden Data Variabel Kualitas Laporan Keuangan	42
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1).....	44
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel (Y) Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko (X2).....	44
Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	45
Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1) dan Penilaian Resiko (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	46
Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas.....	46
Tabel 15. Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 16. Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 17. Uji Regresi secara Parsial (t)	49
Tabel 18. Uji Regresi secara simultan (F)	50
Tabel 19. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	19
Gambar 2. Diagram Scatterplott	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Peran sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah mendapat perhatian luas dari para auditor internal, auditor eksternal, penyusun laporan keuangan, asosiasi profesi dan badan-badan legislatif serta para birokrat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pemerintahan. (Abdullah, 2008).

Dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya yang tentu saja akan berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut, serta efektivitas hasilnya, mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal diperlukan untuk meyakinkan bahwa sebagian besar ketidakpastian, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan telah diperhitungkan pengaruhnya pada pencapaian hasil akhir kegiatan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem ini diharapkan dapat memberi keyakinan terhadap penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah sehingga dapat memncapai tujuannya secara efisien dan efektif, meningkatkan daya serap anggaran serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasmah, 2010).

Sistem pengendalian intern pemerintahan merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pusat teknologi informasi pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan resiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal (Mahmudi).

Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Didalam variabel independen ialah sistem pengendalian intern meneliti dua komponen yaitu lingkungan pengendalian dan penilaian resiko.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu top management dalam proses pengambilan keputusan. Di sektor pemerintahan,

penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik/masyarakat sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif pokok berdasarkan (SAP 2010: 25) tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil penelitian terdahulu menurut Desiana Anugrah Budiawan (2014) pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah I bogor provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah I bogor provinsi Jawa Barat, (2) kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah I bogor provinsi Jawa Barat. Jika kekuatan koersif meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah I bogor provinsi Jawa Barat juga akan meningkat. Demikian hasil peneliti terdahulu diatas didukung dengan penelitian menurut Atikah Fathinah Putri (2014) membuktikan sistem pengendalian intern tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Tuti Herawati (2014) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, lingkungan pengendalian dan penilaian resiko berpengaruh positif tetapi indikator kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda pula dengan Novtania Mokoginta (2017) yang dalam hasil penelitiannya

sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan adanya tidak kekonsistenan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui keterkaitan antara sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian dan penilaian resiko terhadap pengelolaan keuangan, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015.”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan antara hasil peneliti satu dengan peneliti lainnya. Terdapat berbagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang masih kurang baik salah satu penyebabnya ialah lemahnya sistem pengendalian intern yang masih lemah didalam penerapan.

1.2.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015 ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015 ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015 ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor 2014-2015 dan dapat menyimpulkan hasil penelitian, serta dapat memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015
3. Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini penulis mempunyai harapan akan diperolehnya manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dibidang akuntansi sektor publik
 - b) Sebagai referensi bahan peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian yang serupa
 - c) Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi pihak lain mengenai sistem pengendalian intern dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2. Kegunaan Praktik

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan pengelolaan keuangan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Banyak definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam merumuskan pengertian pengendalian internal sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pengendalian internal.

Menurut COSO (2013:3) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pegawai yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar terhadap pencapaian tujuan perusahaan yaitu: (a). keandalan pelaporan keuangan, (b). efektifitas dan efisiensi, (c). kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Arens et al (2008:412) Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reabilitas pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi, kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dikoordinasikan oleh personal organisasi dengan metode dan ukuran-ukuran yang didesain oleh entitas dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi seluruh kegiatan operasi organisasi.

2.1.2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2011:252) Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut, karena sangat sulit dan mahal untuk membangun sistem yang sempurna. Disamping itu, sistem pengendalian internal itu sendiri masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga masih memungkinkan untuk diterobos, dilanggar dan dilakukan kesalahan. Sistem pengendalian bukanlah suatu yang final, tetapi harus selalu direview, dievaluasi, diuji, dikembangkan dan diperbaiki.

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah

metode, proses dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.3. Komponen Pengendalian Intern

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan. Elemen sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri dari atas lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan, karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya.

Pada prinsipnya pengendalian merupakan tone from the top sehingga komitmen, peran dan keteladanan dari pimpinan sangat penting. Oleh karena itu pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui :

- a) penegakan integritas
- b) komitmen terhadap kompetensi
- c) kepemimpinan yang kondusif
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

- e) pen dele gasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait Komponen pengendalian intern yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan menegemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

2. Penilaian Resiko

Komponen pengendalian intern yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dengan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko terdiri atas :

- a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b) identifikasi resiko
- c) analisis resiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

- a) review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b) pembinaan sumber daya manusia
- c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) pengendalian fisik atas aset
- e) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- f) pemisahan fungsi
- g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan Pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke pimpinan atau antara karyawan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu saja tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Selain itu informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa komplain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasi ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan (managemen) disemua level wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif, pimpinan harus sekurang-kurangnya :

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas siste pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.1.4. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Mardi (2011:50) Agar suatu sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok yang dapat mendukung prosesnya. Adapun unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi
3. Pelaksanaan kerja secara sehat
4. Pegawai berkualitas

2.1.5. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2011:252) Tujuan dibangunnya pengendalian internal adalah untuk :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun menurut Mardi (2011:59) menjelaskan pengendalian internal yang dirumuskan pada suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan AICPA, maka dapat dirumuskan tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu :

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya syarat tertentu yang digunakan sebagai unsur pendukung.

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko dengan pertimbangannya. Bahwa terdapat beberapa peneliti sebelumnya menetapkan indikator dalam Sistem Pengendalian adalah Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability) dan dapat di bandingkan (comparability).

Menurut Mardiasmo (2004:37) Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus/defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk penilaian kinerja.

Menurut Mahsun (2006:123) Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen pemerintah (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, adapun Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan."

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur

tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

2.2.1. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan. Strukur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi laporan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. LO

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan aktivitas operasi, investasi, pendapatan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus atau Defisit-LO pada

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Mahmudi (2011:106), keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi

yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah menurut Mahsun (2006:123-124) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Perencanaan dan informasi otorisasi
3. Kelangsungan Organisasi
4. Hubungan masyarakat
5. Sumber fakta dan gambaran Menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ahmad Faishol (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil pengujian secara parsial (uji t) dapat dijelaskan bahwa t-hitung \geq t-tabel dengan perbandingan angka sebesar $36,583 \geq 1,667$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, bahwa t-hitung \geq t-tabel dengan perbandingan angka sebesar $24,113 \geq 1,667$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya penilaian resiko berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Secara simultan (uji F) didapatkan hasil bahwa F-hitung \geq F-tabel dengan perbandingan angka $1338,328 \geq 3,98$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh simultan antara lingkungan pengendalian dan penilaian resiko terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Dan memiliki hubungan yang positif antar variabel dengan pengaruh persentase sebesar 45%, di mana pengaruh hubungan tersebut dinyatakan kuat antara lingkungan pengendalian dan penilaian resiko

			terhadap kualitas laporan keuangan, 55% variabel lain yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti.
Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian secara parsial, lingkungan pengendalian dan penilaian resiko berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator Informasi dan komunikasi, pemantauan dan kegiatan pengendalian yang tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Desiana Anugrah Budiawan (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah 1 Bogor Provinsi Jawa Barat)	Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat. Sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat. (2) Kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat. Jika kekuatan koersif meningkat maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat juga akan meningkat.
Ni Made Asih Ristanti (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan	Penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
Novtania Mokoginta (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi	Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai thitung sebesar -3,376

	Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kualitas Laporan Keuangan	dan ttabel sebesar 2,051, dimana thitung < ttabel dengan signifikan sebesar 0,02 lebih besar dari 0,05 sehingga menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan sudah baik, namun belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Atikah Fathinah Putri (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja, Kualitas Laporan Keuangan	Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS dan tingkat signifikan 5% (0,05). Hasil dari pengujian tersebut adalah 1). Terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 2). Tidak terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan 3). Tidak terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan.
Patoni (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan	Dari hasil analisis diketahui konstanta sebesar 21, 755 yang artinya jika penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X) nilainya adalah 0 maka tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai positif yaitu sebesar 21,755. Selain itu diketahui koefisien regresi variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X) sebesar 0,311 yang artinya jika penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 tingkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,311. Koefisien bernilai positif

			artinya telah terjadi hubungan positif antara penerapan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, semakin baik penerapan pengendalian intern maka semakin baik kualitas laporan keuangan.
--	--	--	--

2.4. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tulang punggung seluruh tubuh penelitian serta hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang didasarkan dengan pada tinjauan pustaka dan peneliti sebelumnya.

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan, karena organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang baik akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya.

Teori diatas didukung dengan peneliti terdahulu menurut (Tuti Herawati, 2014) lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasi dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi

setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko dari suatu pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

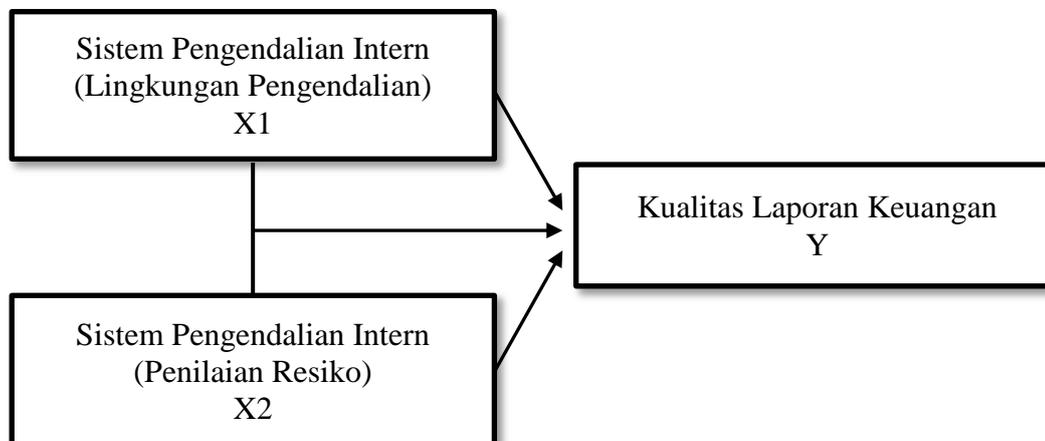
Teori diatas didukung dengan peneliti terdahulu (Tuti Herawati, 2014) bahwa penilaian resiko berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke pimpinan atau antara karyawan.

Teori diatas didukung dengan peneliti terdahulu menurut (Ahmad Faishol, 2016) bahwa sistem pengendalian intern dalam lingkungan pengendalian dan penilaian resiko hubungan yang positif antar variabel dengan pengaruh persentase sebesar 45%, di mana pengaruh hubungan tersebut dinyatakan kuat antara variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, 55% variabel lain yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, dapat disimpulkan menjadi kerangka pemikiran yang berbentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 1
Paradigma Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan dugaan tersebut dengan menguji kebenarannya lebih lanjut. Berdasarkan kerangka penelitian penulis menarik hipotesis semakin kuat sistem pengendalian intern di pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

H1 : Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015

H2 : Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015

H3 : Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan elemen yang ada dalam suatu desain penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian descriptive dan metode penelitian descriptive survey dengan teknik kuantitatif yang merupakan data primer, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko sebagai Variabel Independen berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah sebagai Variabel Dependen.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat yang meliputi Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah. Objek penelitian dilakukan hanya pada satu SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yaitu DPKBD (Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah) merupakan bagian dari unit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menyusun laporan keuangan dengan karakteristik dan peraturan yang telah ditetapkan.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization* yang berupa suatu respon dari divisi organisasi atau perusahaan responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pengguna laporan keuangan pada satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 Kecamatan dan 38 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tepatnya disalah satu SKPD yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah dengan alamat Jl. Aman NO. 01 Tengan Cibinong Bogor Jawa Barat, Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data deskriptif kuantitatif yang merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang diperoleh langsung dari responden untuk menjawab penelitian. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Untuk mengukur variabel ini maka menggunakan skala likert yaitu skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), skor 2 (TS = Tidak Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 4 (S = Setuju) dan skor 5 (SS = Sangat Setuju).

3.3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang ingin diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan
2. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner yang telah disajikan oleh peneliti.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. Variabel penelitian diukur dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Adapun pengukuran dan operasionalisasi variabel dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015”

Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Sistem Pengendalian Intern (Lingkungan Pengendalian)	- Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat - Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Skala Likert 1-5 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral	Ordinal

X1	- Komitmen terhadap kompetensi	4. Setuju 5. Sangat Setuju	
Sistem Pengendalian Intern (Penilaian Resiko) X2	- Penetapan Tujuan - Identifikasi Resiko - Analisa Resiko	Skala Likert 1-5 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan Y	- Andal - Relevan - Dapat dipahami - Dapat dibandingkan	Skala Likert 1-5 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor, metode yang digunakan dalam adalah simple random sampling, yang mana pengambilan sampel berdasarkan secara acak tanpa memperlihatkan strata yang ada dalam populasi tersebut, serta dalam pengambilan sampel tersebut dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

3.6.1. Riset Lapangan (*Field Research*)

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Kuesioner

Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bogor dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bogor. Adapun dokumen-dokumen yang menggambarkan sejarah Kabupaten Bogor.

3.6.2. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web, dan peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

3.7.1. Analisis Deskriptif

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif. Menurut Jan Horas Purba (2005), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dengan tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dan subjek yang diteliti. Penelitian ini berkaitan dengan opini, kejadian atau prosedur”.

Jenis penelitian ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor serta mengemukakan data diri dan jawaban yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dengan menggunakan SPSS ver 23.

Tabel 3
Pengelolaan Skala Pengukuran dalam Kuisisioner Responden

Notasi	Nilai	Keterangan
Sangat Setuju (SS)	5	Jawaban apabila responden sangat setuju dengan pertanyaan dalam kuisisioner
Setuju (S)	4	Jawaban apabila responden setuju dengan pertanyaan dalam kuisisioner

Netral (N)	3	Jawaban apabila responden netral antara setuju atau tidak setuju
Tidak Setuju (TS)	2	Jawaban apabila responden tidak setuju dengan pertanyaan dalam kuisioner
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Jawaban apabila responden sangat tidak setuju dengan pertanyaan dalam kuisioner

3.7.2. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaannya pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi (*Pearson correlation*). Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas di ukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha (a)*, yaitu suatu variabel dikatakan realible jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha (a) > 0.60*.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas dapat dilihat dari:

1. *Nilai Tolerance*
2. *Variance inflation factor (VIF)*

Menurut Duwi Priyatno (2012:151) multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada

model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (R^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF >10 atau jika nilai *tolerance* $<0,1$ maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai VIF <10 atau jika nilai *tolerance* $>0,1$ maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

2. Uji Autokorelasi

Menurut Duwi Priyatno (2012:172) Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan mengetahui dalam model regresi ada atau tidaknya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Run Test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Syarat tidak adanya autokorelasi di dalam model regresi linier apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ (random).

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Gozali (2011:139) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika pengamatan dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode grafik plot. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas;
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Menurut Santoso (2002) Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan pada Heterokedastisitas kesalahan yang terjadi

tidak random, tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual dan satu pengamatan kepengamatan lainnya.

3.7.4. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan antara dua atau lebih variable independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS Versi 21 for Windows.

Persamaan Linear berganda :

$$Y' = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y' = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

X_1 = Lingkungan Pengendalian

X_2 = Informasi dan Komunikasi

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2 \dots X_n = 0$)

β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error

3.7.5. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan digunakan Analisis Uji Hipotesis. Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Menurut Duwi Priyatno (2012:178) Uji ini pada dasarnya apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara parsial atau masing-masing terhadap variabel dependen. Pengujian atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut Priyatno penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0.05 maka hipotesis diterima,
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka hipotesis ditolak.

2. Uji Regresi secara Simultan (Uji F)

Menurut Duwi Priyatno (2012:178) Uji F dilakukan untuk mempengaruhi pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA.

Untuk mengetahui variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. Dengan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05 :

- a. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Duwi Priyatno (2012:180) Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen (sistem pengendalian Internal) terhadap variabel dependen (Kualitas laporan keuangan). Besarnya koefisien determinasi dilihat dari jumlah Adjusted R-Squared (R^2) pada koefisien regresinya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai koefisien determinasi $> 0,5$ artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat.
- b. Jika nilai koefisien determinasi $= 0,5$ artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan sedang.
- c. Jika nilai koefisien determinasi $< 0,5$ artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan relatif kurang baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015 yang bersumber dari data primer dari Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor yang menjadi sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bogor

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari sembilan kelompok pemukiman digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalibaru/Kalimulya. Penggalan untuk membuat terusan kali dilanjutkan di sekitar pusat pemerintahan, namun pada tahun 1754 pusat pemerintahannya terletak di Tanah Baru kemudian dipindahkan ke Sukahati (Sekarang Kampung Empang).

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah bahwa pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd Van de Negorij Bogor, yang berarti kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri mulai dibangun pada tahun 1817.

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada empat abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ‘ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan’. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu :

1. Kerajaan Taruma Negara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.
2. Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 orang raja. Berkuasa sejak tahun 516 sampai dengan tahun 852.

3. Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 orang raja. Berkuasa sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Kawali yang diperintah oleh 6 orang raja berlangsung sejak tahun 1333 hingga 1482.
4. Kerajaan Pajajaran, Berkuasa sejak tahun 1482 sampai dengan tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bogor yang secara resmi dikukuhkan melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada tanggal 26 Mei 1972.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Dalam Negeri) menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri dan pindah dari Pusat Pemerintahan Kota Madya Bogor atas dasar tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi (Rancamaya), Leuwiliang, Parung dan Kecamatan Cibinong (Desa Tengah).

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Rancamaya wilayah Kecamatan Ciawi. Akan tetapi pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan pusat pemerintahan Kotamadya Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kotamadya Bogor. Oleh karena itu, atas petunjuk pemerintah Pusat agar pemerintah daerah Tingkat II Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah dari hasil tahun 1980, ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor terletak di Desa Tengah Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota pusat pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Desa Tengah Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu dimulailah rencana persiapan pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor pada saat itu.

4.1.2. Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor atau yang sekarang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya bidang keuangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Aparatur Dinas pengelolaan keuangan barang Daerah saat ini sebanyak 90 Orang yang terdiri dari 88 PNS dan 2 orang Non PNS. Dari sisi jenjang pendidikan, sebanyak 25 orang aparatur sudah berpendidikan prasarjana (S2), 44 orang sarjana(S1), D3 sebanyak 2 orang, SMA 19 orang. Berbagai latar belakang pendidikan melengkapi kompetensi Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah dalam melaksanakan tugas diantaranya, SE, Msi, SH, ME, S.AP, MM, A.Md, S.Sos, MH, S,Ag, S.Si, S.ET, ST, S.Kom dan dari segi kualifikasi golongan kepegawaian, terdapat 6 orang golongan VI, 67 orang golongan III, 15 orang golongan II, dan 2 orang tenaga kontrak.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan
- b) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan
- c) Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
- d) Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
- e) Pengelolaan keuangan Badan
- f) Pengelolaan situs web Badan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan

Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan
- b) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
- c) Pengelolaan penyusunan anggaran Badan
- d) Pengelolaan situs web Badan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan
- b) Pengelolaan barang/jasa Badan
- c) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum
- d) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
- e) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penatausahaan keuangan Badan
- b) Penyusunan pelaporan keuangan Badan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

2. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah

- d) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran

Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD
- b) Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah
- c) Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi Pemerintah Daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Anggaran PPKD

Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan PPKD, belanja PPKD dan pembiayaan
- b) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPKD
- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran PPKD
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Anggaran Belanja.

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan analisa rancangan anggaran belanja daerah;
- b) Penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- c) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah;

- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan kas daerah;
- b) Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai;
- c) Pengelolaan anggaran PPKD;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1) Sub Bidang Kas Daerah

Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- c) Pelaksanaan penyimpanan uang;
- d) Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan utang daerah;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kas Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan;
- b) Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan;
- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD

Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran PPKD;
- b) Pelaksanaan penatausahaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga;
- c) Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan;
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan PPKD; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah
- b) Pengelolaan pelaporan keuangan daerah
- c) Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1) Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
- b) Penyiapan bahan penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan Daerah
- b) Penyiapan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester pertama dan prognosis Pemerintah Daerah
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan laporan kinerja Pemerintah Daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Teknologi Informasi

Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah;
- b) Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah;
- c) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG ASET DAERAH

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- c) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

1) Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Penatausahaan

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan barang milik daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi barang milik daerah
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan barang milik daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang milik daerah
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang milik daerah
- d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Analisis Deskriptif Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 25 Mei – 11 Juni 2018. Dari 40 Kuisioner yang disebar terdapat 30 kuisioner yang diterima, tidak terdapat kuisioner yang cacat yang diolah oleh penulis.

Adapun rincian perindustrian kuisioner tersebut dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 4
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisioner Responden

No	Keterangan	Jumlah Kuisioner	Presentase
1	Distribusi Kuisioner	40	100%
2	Kuisioner yang Kembali	30	75%
3	Kuisioner yang dapat diolah	30	75%

Sumber : Data Primer, data diolah 2018

Responden terdiri dari kepala dinas, kepala bagian, sekretaris dan staf yang menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, sebanyak 30 kuisioner yang dikembalikan oleh responden, dan dapat dipergunakan dalam pengolahan data. Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 17 orang dengan tingkat presentase sebesar 56.7% lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan yang berjumlah 13 orang dengan tingkat presentase sebesar 43.3% dari jumlah keseluruhan responden.

Tabel 5
Deskripsi Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	17	56,7	56,7	56,7
Perempuan	13	43,3	43,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis dengan SPSS 23, 2018

b. Jabatan/Bagian

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa kebanyakan responden adalah staff yaitu sebanyak 14 dengan tingkat presentase sebesar 46.7%, Kepala Dinas 1 orang dengan tingkat presentase sebesar 3.33%, sekretaris 1 orang dengan tingkat presentase sebesar 3.33%, Kepala Bagian 3 orang dengan tingkat presentase sebesar 10%, Kepala Bidang 4 orang dengan tingkat presentase sebesar 13.33%, Seksi-seksi 4 orang dengan tingkat presentase sebesar 13.33% dan Tenaga Rekrutmen 3 dengan tingkat presentase sebesar 10%.

Tabel 6
Deskripsi Jabatan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kepala Dinas	1	3,3	3,3	3,3
Kepala Bagian	3	10,0	10,0	13,3
Kepala Bidang	4	13,3	13,3	26,7
Staff	14	46,7	46,7	73,3
Tenaga Rekrutmen	3	10,0	10,0	83,3
Seksi-seksi	4	13,3	13,3	96,7
Sekretaris	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Sumber : Data Primer, data diolah Penulis dengan SPSS 23, 2018

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X1), sistem pengendalian intern didalam penilaian resiko (X2) dan variabel kualitas laporan keuangan (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X1), sistem pengendalian intern didalam penilaian resiko (X2) dan kualitas laporan keuangan (Y) yang terdapat dalam kuisioner yaitu :

Tabel 7
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian (X1)

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F			2	20	8	30	4.2
	Skor			6	80	40	126	
	%			20	66.67	26.67	100	
Pernyataan 2	F			2	22	6	30	4.1
	Skor			6	88	30	124	
	%			6.67	73.33	20	100	
Pernyataan 3	F			1	20	9	30	4.27
	Skor			3	80	45	128	
	%			3.33	66.67	30	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4.19

Sumber : Data primer, data diolah penulis dengan SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel diatas, penilaian sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian yang terdiri dari hasil kuisioner yang disebarkan ke pegawai SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) Kabupaten Bogor. Dari segi sistem pengendalian didalam lingkungan pengendalian terdapat indikator pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang baik.

Persepsi responden terhadap item-item pernyataan mengenai lingkungan pengendalian (X₁) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 4,19 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden

menganggap lingkungan pengendalian sangat penting diterapkan didalam instansi pemerintah. Pada variabel ini, nilai indeks tertinggi sebesar 4,27 mengenai perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Indikator yang berada nilai indeks terendah sebesar 4,1 mengenai item pernyataan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Dalam hal ini para pegawai dan pimpinan harus selalu mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X1), sistem pengendalian intern didalam penilaian resiko (X2) dan variabel kualitas laporan keuangan (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X1), sistem pengendalian intern didalam penilaian resiko (X2) dan kualitas laporan keuangan (Y) yang terdapat dalam kuissioner yaitu :

Tabel 8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko (X2)

Jawaban Responden	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot	1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F		1	20	9	30	4.27
	Skor		3	80	45	128	
	%		3.33	66.67	30	100	
Pernyataan 2	F	1	3	20	6	30	3.97
	Skor		9	80	30	119	
	%		10	66.67	20	100	
Pernyataan 3	F		3	20	7	30	4.13
	Skor		9	80	35	124	
	%		10	66.67	23.33	100	
Rata-rata Keseluruhan							4.12

Sumber : Data primer, data diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas, penilaian sistem pengendalian intern didalam penilaian resiko yang terdiri dari hasil kuisisioner yang disebarkan ke pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dari segi sistem pengendalian didalam penilaian resiko terdapat indikator menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pertanyaan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu, melakukan identifikasi resiko untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metedologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif dan melakukan analisis resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Persepsi responden terhadap item-item pernyataan mengenai lingkungan pengendalian (X_2) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 4,12 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden menganggap penilaian resiko sangat penting diterapkan didalam instansi pemerintah. Pada variabel ini, nilai indeks tertinggi sebesar 4,27 mengenai melakukan analisa resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Indikator yang berada nilai indeks terendah sebesar 3,97 mengenai item pernyataan melakukan identifikasi resiko untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metedologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Dalam hal ini pimpinan harus sangat mengerti tentang resiko apa yang akan dihapai dari pihak manapun dan mengerti terhadap metedologi yang sesuai dengan tujuan instansi sehingga dapat terhindar dari resiko yang akan terjadi atau meminimalkan resiko dengan mencari metedologi yang begitu banyak sehingga mencapai tujuan instansi pemerintah.

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Untuk menganalisi jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X_1) dan penilaian resiko (X_2) dan variabel kualitas laporan keuangan (Y), peneliti menggunakan 5 skala *likert*, yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkit dengan pernyataan-pernyataan dengan variabel pengaruh sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian (X_1) dan penilaian resiko (X_2) dan variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang terdapat dalam kuisisioner yaitu :

Tabel 9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F			2	22	6	30	4.13
	Skor			6	88	30	124	
	%			6.67	73.33	20	100	
Pernyataan 2	F		1	7	16	6	30	3.9
	Skor		2	21	64	30	117	
	%		0.33	23.33	53.33	20	100	
Pernyataan 3	F			1	21	8	30	4.23
	Skor			3	84	40	127	
	%			0.33	2.8	26.67	100	
Pernyataan 4	F			3	21	6	30	4.1
	Skor			9	84	30	123	
	%			10	70	20	100	
Pernyataan 5	F			1	21	8	30	4.23
	Skor			3	84	40	127	
	%			0.33	70	26.66	100	
Pernyataan 6	F			2	19	9	30	4.23
	Skor			6	76	45	127	
	%			6.67	63.33	30	100	
Pernyataan 7	F			4	19	7	30	4.1
	Skor			12	76	35	123	
	%			13.33	63.33	23.33	100	
Pernyataan 8	F			3	21	6	30	4.1
	Skor			9	84	30	123	
	%			10	70	20	100	
Rata-rata Keseluruhan								4.13

Sumber : Data primer, data diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas, penilaian kualitas laporan keuangan yang terdiri dari hasil kuisisioner yang disebarkan ke pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dari segi kualitas laporan keuangan terdapat indikator andal memiliki 3 (tiga) indeks pernyataan kuisisioner, relevan memiliki 3 (tiga) indeks pernyataan kuisisioner, dapat dipahami memiliki 1 (satu) indeks pernyataan dan dapat dibandingkan memiliki 1 (satu) indeks pernyataan.

Persepsi responden terhadap indikator mengenai kualitas laporan keuangan (Y) berada pada daerah tinggi dengan skor rata-rata keseluruhan 4,13 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini berarti bahwa responden menganggap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor cukup baik secara keseluruhan dari segi indikator andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Indikator yang berada nilai indeks terendah sebesar 3,9 mengenai indikator andal dengan item pernyataan instansi atau lembaga menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus. Dengan hal itu mengartikan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah tidak selalu dapat menginformasikan kepada siapapun dengan bentuk berkas apapun yang benar-benar harus dirahasiakan oleh umum sekalipun ada kebutuhan khusus.

4.3. Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui sah tidaknya suatu kuisioner dan dapat dikatakan valid jika pertanyaan atau pertanyaannya mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut, maka pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Person Correlation. Dengan kriteria :

1. Jika sig (2-tailed) < 0,05 = valid
2. Jika sig (2-tailed) > 0,05 = tidak valid

Signifikansi dilihat dari kolom total dari setiap item pertanyaan atau pernyataan

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,450	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,696	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,517	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2018

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel kesiapan sumber daya manusia yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Corralation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05(5%).

Tabel 11
Hasil Uji Validitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko (X2)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,738	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,689	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,687	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2018

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel kesiapan sumber daya manusia yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05(5%).

Tabel 12
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,669	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,482	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,490	0,361	Valid
4	Pernyataan 4	0,362	0,361	Valid
5	Pernyataan 5	0,701	0,361	Valid
6	Pernyataan 6	0,606	0,361	Valid
7	Pernyataan 7	0,480	0,361	Valid
8	Pernyataan 8	0,363	0,361	Valid

Sumber : Data Primer, diolah 2018

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian di dalam variabel kesiapan sistem informasi yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > dari r_{tabel} pada signifikan 0,05(5%).

2. Uji Reliabelitas

Konsep reliabelitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan koefisien. Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal.

Uji reliabelitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Mengukur handal atau tidaknya kuisisioner yang digunakan dalam variabel penelitian, metode yang digunakan untuk mengukur reliabelitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronchbach's* dimana instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,600$.

Tabel 13
 Hasil Uji Reliabelitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam
 Lingkungan Pengendalian dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,64	0,60	Reliabel
Penilaian Resiko	0,77	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,70	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel sistem pengendalian didalam lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kualitas laporan keuangan yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2014:134) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila *tolerance value* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 14
 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1 Pengendalian	.998	1.002	
Penilaian	.998	1.002	

Sumber: Hasil SPSS 23, diolah 2018

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas mendekati angka 1 atau $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi untuk variabel lingkungan

pengendalian dan penilaian resiko tidak terdapat multikolinieritas dan model regresi layak untuk dipakai.

2. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Gozali (2013) Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 15
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,545 ^a	,298	,245	1,86279	1,583

a. Predictors: (Constant), Penilaian Resiko, Lingkungan Pengendalian

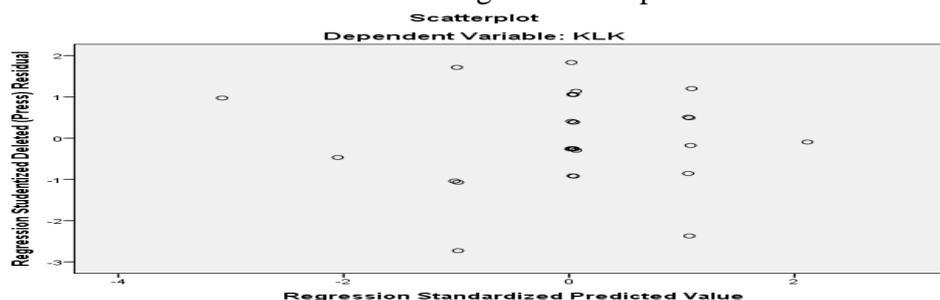
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi dilihat antara nilai tabel durbin watson berada diantara nilai dL dan dU. Nilai dU ditabel durbin watson $1,2138 < 1,6498, (3 - 1,2138)$ jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel durbin watson hasilnya bebas dari autokorelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, maka Peneliti menggunakan alat analisis grafik (*scatterplot*) Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke satu pengamatan lainnya tetap, maka disebut Heterokedastisitas. Dan jika varian berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik dibawah ini.

Gambar 2
Diagram Scatterplot



Dilihat dari diagram diatas, titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola apapun ini membuktikan bahwa tidak terjadi heterokedasitas. Hal ini berarti model regresi layak digunakan dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

4.3.3. Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Penerapan anggaran berbasis kinerja secara parsial terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Dinas pengelolaan keuangan barang daerah pada pemerintahan daerah bogor.

Tabel 16
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	14,080	6,356		,000
	LP	1,460	,463	,539	,004
	PR	,047	,425	,019	,013

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Dari tabel tersebut diperoleh bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,080 + 1,460x_1 + 0,047x_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk dan tabel sebagai hasil analisis regresi, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Konstanta dan koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan semakin baik seiring dengan bertambah kuat sistem pengendalian intern dengan indikator lingkungan pengendalian dan penilaian resiko
2. Koefisien regresi sebesar 1,460 untuk variabel kemampuan auditor (X1), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X1 sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan Y sebesar 1,460% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap).
3. Koefisien regresi sebesar 0,047 untuk variabel pengalaman auditor (X2), nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan X2 sebesar 1% akan

menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,047% (dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya adalah tetap).

Untuk lebih meyakinkan bahwa hasil analisis tersebut mampu untuk menjelaskan model yang digunakan, maka perlu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

4.3.4. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi secara Parsial (t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013:88). Hasil uji t yang diperoleh dalam penelitian ini adalah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.080	4.079		1.392	.0355
1 Lingkungan Pengendalian	1.460	.463	.539	3.155	.004
Penilaian Resiko	.047	.425	.019	2.110	.013

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil SPSS 23, 2018

Hasil penelitian koefisien regresi nilai t signifikansi secara parsial sebagai berikut :

- a. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai $t_{hitung} 3.155 > t_{tabel} 1.703$ atau nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial lingkungan pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Pengaruh penilaian resiko terhadap kualitas laporan keuangan maka diperoleh nilai $t_{hitung} 2.110 > t_{tabel} 1.703$ atau nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian resiko berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Uji Regresi secara Simultan (F)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan (bersama - sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:88). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_o , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima dan menolak H_a .

Tabel 18
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39,677	2	19,838	5,717	,009 ^b
	Residual	93,690	27	3,470		
	Total	133,367	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Penilaian Resiko, Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $5,717 > F_{tabel}$ sebesar 3,35 dengan tingkat signifikan $0,009 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern lingkungan pengendalian dan penilaian resiko terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:87) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Adapun hasil uji determinasi *Adjusted R²*.

Tabel 19
Hasil Uji R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,545 ^a	,298	,245	1,86279	1,583

a. Predictors: (Constant), Penilaian Resiko, Lingkungan Pengendalian

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,545 atau 54,5% hal ini berarti Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh variabel Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko sebesar 54,5% dan sisanya 45,5%

dipengaruhi oleh indikator dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Sistem Pengendalian dalam Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pada tabel 17 dapat dilihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,004 dan t_{hitung} sebesar karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,155 > 1,703$), maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dalam *lingkungan pengendalian* memiliki pengaruh yang positif terhadap *kualitas laporan keuangan*.

4.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian dalam Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan, dan jika signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pada tabel 17 dapat dilihat bahwa signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,013 dan t_{hitung} sebesar karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,110 > 1,703$), maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dalam *penilaian resiko* memiliki pengaruh yang positif terhadap *kualitas laporan keuangan*.

4.4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *lingkungan pengendalian* dan *penilaian resiko* secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu *kualitas laporan keuangan*. Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan uji statistik yang membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} dimana nilai F_{hitung} yang didapatkan sebesar 5,717 lebih besar dari F_{tabel} yaitu , 3,35 ($5,717 > 3,35$).

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Setelah melakukan tahapan pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko* di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor, penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

4.5.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi.

Berdasarkan uji parsial pada tabel 17, sistem pengendalian intern dalam *lingkungan pengendalian* memiliki nilai signifikan $0,004 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,155 > 1,703$) sehingga H_1 diterima, dengan demikian *lingkungan pengendalian* memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faishol dan Tuti Herawati bahwa sistem pengendalian intern didalam lingkungan pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penilaian resiko merupakan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun luar instansi.

Berdasarkan uji parsial pada tabel 17, sistem pengendalian intern didalam *lingkungan pengendalian* memiliki nilai signifikan $0,013 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,110 > 1,703$) sehingga H_2 diterima, dengan demikian *penilaian resiko* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati bahwa sistem pengendalian intern dalam penilaian resiko memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.5.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *lingkungan pengendalian* dan *penilaian resiko* secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu *kualitas laporan keuangan*. Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan uji statistik yang membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} dimana nilai F_{hitung} yang didapatkan sebesar 5,717 lebih besar dari F_{tabel} yaitu , 3,35 ($5,717 > 3,35$).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Pengaruh Sistem pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015 menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Dengan hasil pengujian t memiliki signifikan $0,004 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3.155 > t_{tabel} 1.703$. Hal ini mengartikan bahwa jika Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015. Namun penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia belum dilaksanakan dengan optimal
2. Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Dengan hasil pengujian t memiliki signifikan $0,013 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2.110 > t_{tabel} 1.703$. Hal ini mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Intern dalam Penilaian Resiko pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015. Namun dalam mengidentifikasi resiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metedologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif masih harus ditingkatkan lagi
3. Sistem Pengendalian Intern dialam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Dengan hasil pengujian hipotesis F memiliki nilai signifikan $0,009 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,717 > F_{tabel}$ sebesar 3,35. Dengan demikian artinya semakin baik Sistem Pengendalian Intern dalam Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor di Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014-2015.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

- 1) Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia perlu dilakukan pelatihan yang berkesinambungan dan peningkatan sistem komunikasi dan informasi yang baik lagi
- 2) Dalam rangka mengidentifikasi resiko dari faktor eksternal dan internal perlu membuat perencanaan yang lebih strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan dari faktor eksternal dan peningkatan pengendalian internal

B. Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya melakukan penelitian dengan indikator lingkungan pengendalian dan penilaian resiko pada satu SKPD saja tetapi menambahkan dengan indikator lain dalam sistem pengendalian intern yaitu kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pada beberapa SKPD sehingga hasil penelitian yang didapat lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faishol (2016), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)
- Amin Wijadya Tunggal (2012), COSO, Jakarta.
- Arens et al (2008), Auditing and Assurance Service, Edisi Dua Belas. Jakarta.
- Atikah Fathinah Putri (2014), pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu): Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- COSO (2013), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Deddi Noordiawan (2006), Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta.
- Desiana Anugrah Budiawan (2014), Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diwilayah 1 Bogor Provinsi Jawa Barat)
- Dwi Priyatno (2012), Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS, Yogyakarta: Andi
- Imam Gozali (2013), aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Edisi Tujuh. Semarang.
- Jan Horas V Purba (2005), Metodologi Penelitian, Bogor: Universitas Pakuan Bogor (Diklat Kuliah)
- Mahmudi (2007:27), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Mahmudi (2011:252), Akuntansi Sektor Publik, Edisi pertama. Yogyakarta.
- Mahsun (2006:123), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Mardi (2011:50), Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Jakarta.
- Mardiasmo (2004:37), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi (2013), Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta.
- Ni Made Asih Ristanti (2014), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance
- Novtania Mokoginta (2017), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Patoni (2016), Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah N0.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Santoso Singgih (2014), Statistik Multivariat Edisi Revisi, Jakarta.

Tuti Herawati (2014), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah pemda Cianjur). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI. Bandung.

LAMPIRAN

LEMBAR KUISIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : P / L
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pangkat/Golongan :
6. Jabatan :
7. Lama di Instansi Tersebut :

B. PETUNJUK KUISIONER

Adapun petunjuk pengisian kuisisioner adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan apa adanya.
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilih satu alternative jawaban paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu/Saudara(i) pada pernyataan tersebut maka akan semakin tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini.
4. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut :

Simbol	Kategori
STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
N	Netral
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

C. DAFTAR PERNYATAAN

1. Sistem Pengendalian Intern (Variabel X)

NO	PERNYATAAN	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
	LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
1	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai					
2	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia					
3	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif					
	PENILAIAN RESIKO					
4	Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pertanyaan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu					
5	Melakukan identifikasi resiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif					
6	Melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah					

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

NO	PERNYATAAN	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
	ANDAL					
1	Transaksi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan					
2	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus					
3	Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji					
	RELEVAN					
4	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi dimasa lalu					
5	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu					
6	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap					
	DAPAT DIPAHAMI					
7	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna					
	DAPAT DIBANDINGKAN					
8	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya					

LEMBAR PENGUMPULAN DAN UJI DATA

Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuisioner Responden

No	Keterangan	Jumlah Kuisioner	Presentase
1	Distribusi Kuisioner	40	100%
2	Kuisioner yang Kembali	30	75%
3	Kuisioner yang dapat diolah	30	75%

Deskripsi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	17	56,7	56,7	56,7
Perempuan	13	43,3	43,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Deskripsi Jabatan Responden

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kepala Dinas	1	3,3	3,3	3,3
Kepala Bagian	3	10,0	10,0	13,3
Kepala Bidang	4	13,3	13,3	26,7
Staff	14	46,7	46,7	73,3
Tenaga Rekrutmen	3	10,0	10,0	83,3
Seksi-seksi	4	13,3	13,3	96,7
Sekretaris	1	3,3	3,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1)

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F			2	20	8	30	4.2
	Skor			6	80	40	126	
	%			20	66.67	26.67	100	
Pernyataan	F			2	22	6	30	4.1

2	Skor			6	88	30	124	
	%			6.67	73.33	20	100	
Pernyataan 3	F			1	20	9	30	4.27
	Skor			3	80	45	128	
	%			3.33	66.67	30	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4.19

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko (X2)

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F			1	20	9	30	4.27
	Skor			3	80	45	128	
	%			3.33	66.67	30	100	
Pernyataan 2	F		1	3	20	6	30	3.97
	Skor			9	80	30	119	
	%			10	66.67	20	100	
Pernyataan 3	F			3	20	7	30	4.13
	Skor			9	80	35	124	
	%			10	66.67	23.33	100	
Rata-rata Keseluruhan								4.12

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F			2	22	6	30	4.13
	Skor			6	88	30	124	
	%			6.67	73.33	20	100	
Pernyataan 2	F		1	7	16	6	30	3.9
	Skor		2	21	64	30	117	
	%		0.33	23.33	53.33	20	100	
Pernyataan	F			1	21	8	30	4.23

3	Skor			3	84	40	127	
	%			0.33	2.8	26.67	100	
Pernyataan 4	F			3	21	6	30	4.1
	Skor			9	84	30	123	
	%			10	70	20	100	
Pernyataan 5	F			1	21	8	30	4.23
	Skor			3	84	40	127	
	%			0.33	70	26.66	100	
Pernyataan 6	F			2	19	9	30	4.23
	Skor			6	76	45	127	
	%			6.67	63.33	30	100	
Pernyataan 7	F			4	19	7	30	4.1
	Skor			12	76	35	123	
	%			13.33	63.33	23.33	100	
Pernyataan 8	F			3	21	6	30	4.1
	Skor			9	84	30	123	
	%			10	70	20	100	
Rata-rata Keseluruhan								4.13

Hasil Uji Validitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian (X1)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,450	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,696	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,517	0,361	Valid

Hasil Uji Validitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Penilaian Resiko (X2)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,738	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,689	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,687	0,361	Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item – Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,669	0,361	Valid
2	Pernyataan 2	0,482	0,361	Valid
3	Pernyataan 3	0,490	0,361	Valid
4	Pernyataan 4	0,362	0,361	Valid
5	Pernyataan 5	0,701	0,361	Valid
6	Pernyataan 6	0,606	0,361	Valid
7	Pernyataan 7	0,480	0,361	Valid
8	Pernyataan 8	0,363	0,361	Valid

Hasil Uji Reliabelitas Variabel (X) Sistem Pengendalian Intern didalam Lingkungan Pengendalian dan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,64	0,60	Reliabel
Penilaian Resiko	0,77	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,70	0,60	Reliabel

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

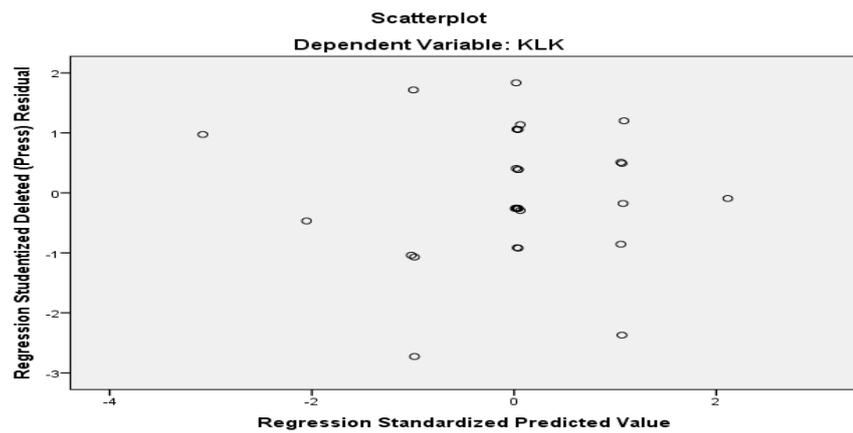
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengendalian	.998	1.002
Penilaian	.998	1.002

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.545 ^a	.298	.245	1,86279	1,583

Diagram Scatterplot



Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	14,080	6,356		,000
	LP	1,460	,463	,539	,004
	PR	,047	,425	,019	,013

Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.080	4.079		1.392	.0355
Lingkungan Pengendalian	1.460	.463	.539	3.155	.004
Penilaian Resiko	.047	.425	.019	2.110	.013

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	39,677	2	19,838	5,717	.009 ^b
Residual	93,690	27	3,470		
Total	133,367	29			

Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.545 ^a	.298	.245	1,86279	1,583